

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian upaya dan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan menjamin pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan perekonomian regional dan memenuhi kebutuhan peralihan jasa perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Lebih lanjut, pembangunan ekonomi diartikan sebagai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran di negara-negara berkembang (Todaro, 2011). Artinya, kesenjangan atau ketimpangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dari perspektif ekonomi baru.

Ketimpangan pendapatan tidak hanya menjadi masalah bagi negara-negara berkembang, bahkan negara-negara maju pun tidak dapat menghindari masalah ketimpangan pendapatan. Perbedaannya terletak pada tingkat atau derajat ketimpangan yang terjadi serta cara penyelesaian tingkat kesulitan yang dihadapi. Keadaan distribusi pendapatan di beberapa negara terbagi menjadi dua gambaran, yaitu distribusi pendapatan relatif dan distribusi pendapatan absolut. Distribusi pendapatan relatif yang dimaksud adalah

perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai kelompok penerima pendapatan yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu 40% penduduk berpendapatan terendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% penduduk berpendapatan tertinggi. Sedangkan distribusi pendapatan absolut adalah persentase penduduk yang mempunyai pendapatan sama dengan atau lebih rendah dari tingkat pendapatan tertentu (Sukirno, 2006).

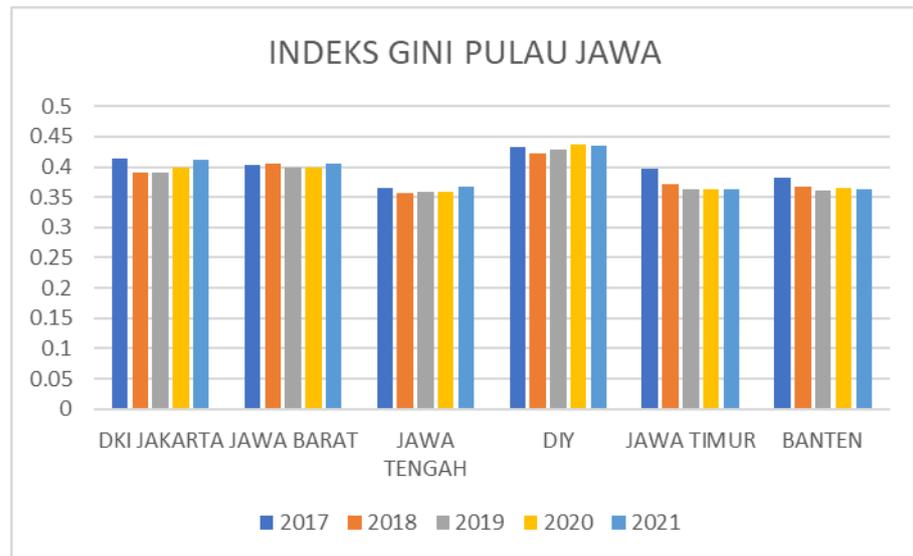
Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr Ayat 7 menjelaskan mengenai distribusi pendapatan agar harta tidak berputar hanya pada orang-orang tertentu saja, tetapi harus berputar di semua kalangan masyarakat agar semuanya dapat menikmatinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.

Al-Hasyr [59]:7 berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Ukuran yang digunakan untuk menentukan ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini atau indeks Gini yang berkisar antara 0 sampai 1. Indeks Gini yang bernilai 0 melambangkan kesetaraan sempurna ketika setiap orang memiliki pendapatan yang hampir sama. Sedangkan indeks Gini sebesar 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (BPS, 2023).



Sumber: BPS Indonesia, 2023 diolah

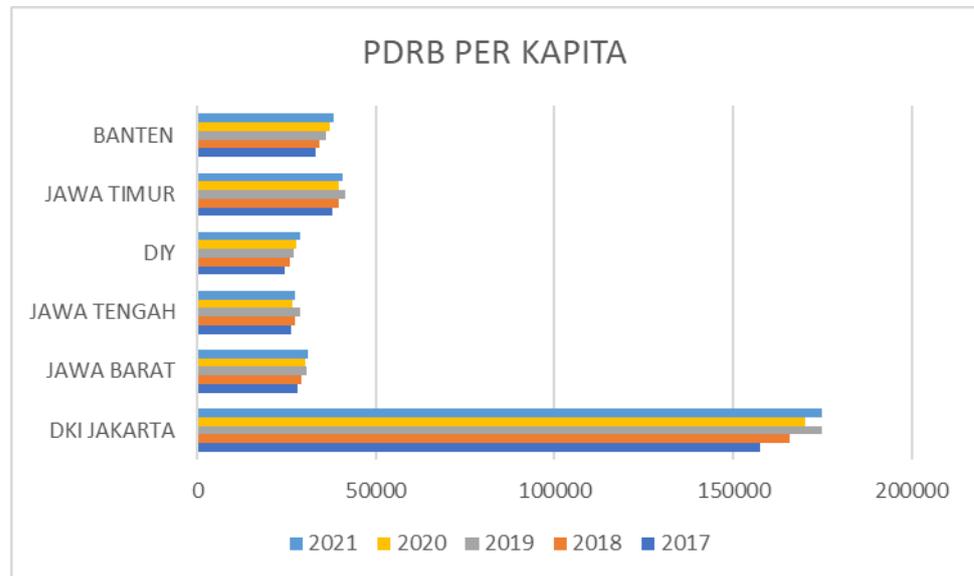
GAMBAR 1.1.
Grafik Indeks Gini Pulau Jawa Tahun 2017-2021

Berdasar Gambar 1.1., indeks Gini tertinggi di Pulau Jawa pada tahun 2021 berada pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,436, sedangkan nilai indeks Gini terendah ada di Provinsi Jawa Timur dengan nilai indeks 0,364. Pada tahun 2021, terdapat 2 provinsi dengan nilai indeks Gini diatas angka nasional sebesar 0,381, yaitu Provinsi Jawa Barat dengan nilai indeks Gini sebesar 0,406 dan Provinsi DKI Jakarta dengan nilai indeks 0,411.

Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan di Indonesia, baik secara ekonomi maupun pemerintahan. Kondisi ini akan membantu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat ke tingkat ketimpangan yang rendah dibandingkan pulau-pulau lain. Namun keadaan ini belum memungkinkan Pulau Jawa mengalami penurunan kesenjangan dibandingkan dengan pulau-pulau lain, seperti yang ditunjukkan oleh ukuran ketimpangan pendapatan. Pembangunan prasana di Pulau Jawa terus mengalami

peningkatan dan lebih cepat dibandingkan wilayah atau kepulauan lainnya sehingga kegiatan di sektor industri dan jasa di Pulau Jawa dapat bertumbuh cepat. Pulau Jawa memiliki potensi yang bisa digunakan sehingga menjadi sumber pendapatan daerah. Potensi yang berbeda-beda pada tiap-tiap wilayah tersebut adalah suatu kesempatan bagi daerah-daerah yang bila digunakan dengan cara maksimal dapat menciptakan suatu cara pembangunan yang menguntungkan untuk wilayah beserta masyarakatnya.

Peningkatan kesejahteraan pendapatan masyarakat suatu daerah dapat dilihat melalui hasil pembangunan daerah ditinjau dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut (Sasana, 2009). PDRB juga dapat dilihat melalui kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Sedangkan PDRB per kapita merupakan keseluruhan PDRB suatu wilayah yang kemudian dibagi dengan jumlah masyarakat pada wilayah tersebut. PDRB per kapita merupakan indikator yang dipakai untuk mengenali seberapa besar tingkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, semakin tinggi PDRB per kapita maka semakin besar pula kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya untuk mengenali tingkatan kesejahteraan masyarakat, PDRB per kapita pun mempunyai pengaruh pada ketimpangan pendapatan suatu wilayah. PDRB Pulau Jawa sendiri memiliki kontribusi terbesar dan terbanyak kepada PDB Indonesia dibanding kontribusi PDRB pulau yang lain di Indonesia. Dengan demikian, dapat diartikan jika perekonomian di Pulau Jawa mempunyai peranan yang kuat terhadap perekonomian Indonesia.

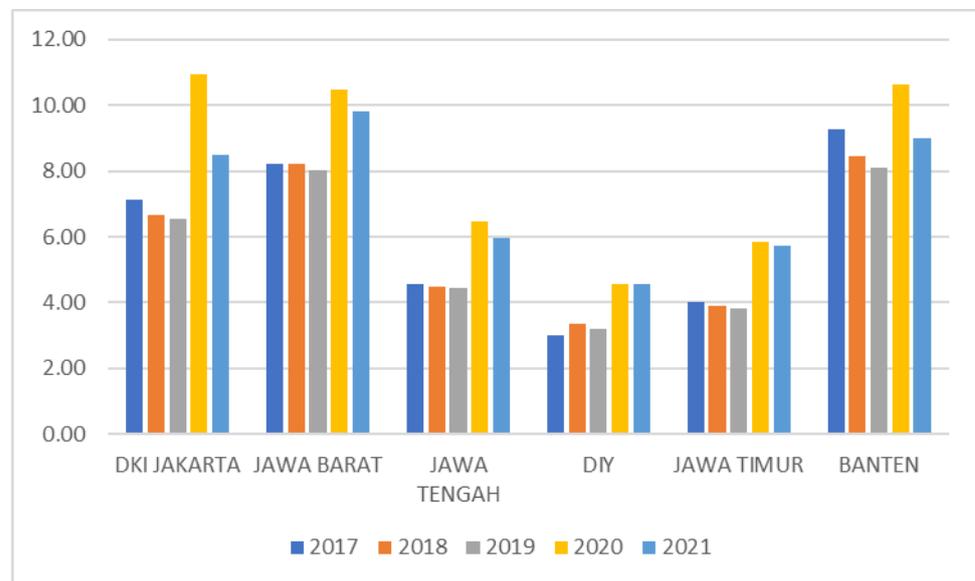


Sumber: BPS Indonesia, 2023 diolah

GAMBAR 1.2.
 Grafik PDRB per kapita di Pulau Jawa Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)

Perolehan PDRB per kapita tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dan terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta. Pada tahun 2019, PDRB per kapita DKI Jakarta sebesar Rp17.481.251 meningkat sebesar 5,46% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan -2,7% atau sebesar Rp17.008.902. Penurunan itu terjadi karena pada saat itu terjadi wabah pandemi Covid-19 sehingga mengurangi kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh, meningkatkan jumlah penduduk miskin, memperluas kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan pengangguran secara nasional. Pada tahun 2021 sudah mengalami peningkatan kembali yaitu perolehan pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp17.496.298, sedangkan pada tahun yang sama, perolehan PDRB per kapita terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar Rp28.901,58.

Selain itu, ketimpangan distribusi pendapatan tidak terlepas dari kondisi demografis dan ketenagakerjaan. Hasil penelitian Devi dan Hasmarani (2022) di Provinsi Kepulauan Riau, mengungkapkan bahwa PDRB dan TPT berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan IPM dan jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.



Sumber: BPS Indonesia, 2023 diolah

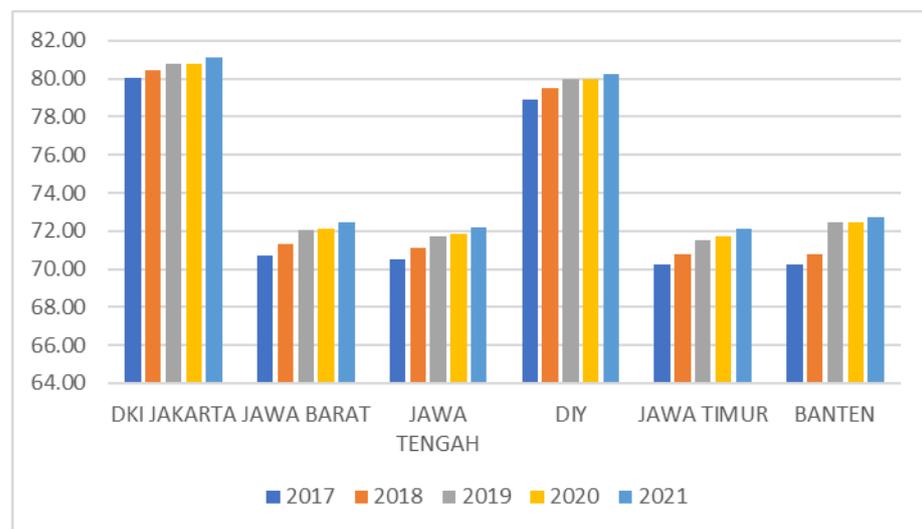
GAMBAR 1.3.

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2017-2021 (Persen)

Berdasar Gambar 1.3., Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 dengan persentase terbesar adalah provinsi DKI Jakarta yaitu 10,95 persen. Persentase TPT tertinggi kedua ada;ah Provinsi Jawa Barat sebesar 10,46 persen. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah dimiliki DI Yogyakarta dengan persentase 4,57 persen. Tingginya pengangguran pada

tahun 2020 diakibatkan karena imbas dari pandemi Covid-19, sehingga banyak sekali perusahaan yang mengalami kebangkrutan hingga melakukan PHK massal.

Untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah, dapat dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendah atau tingginya IPM akan mempengaruhi tingkat produktivitas penduduknya, semakin rendah IPM maka akan semakin rendah tingkat produktivitasnya maka akan berdampak pada masyarakat yang berpendapatan rendah, dan sebaliknya semakin tinggi IPM maka produktivitas penduduknya akan semakin tinggi kemudian akan mendorong tingkat pendapatan menjadi lebih tinggi.



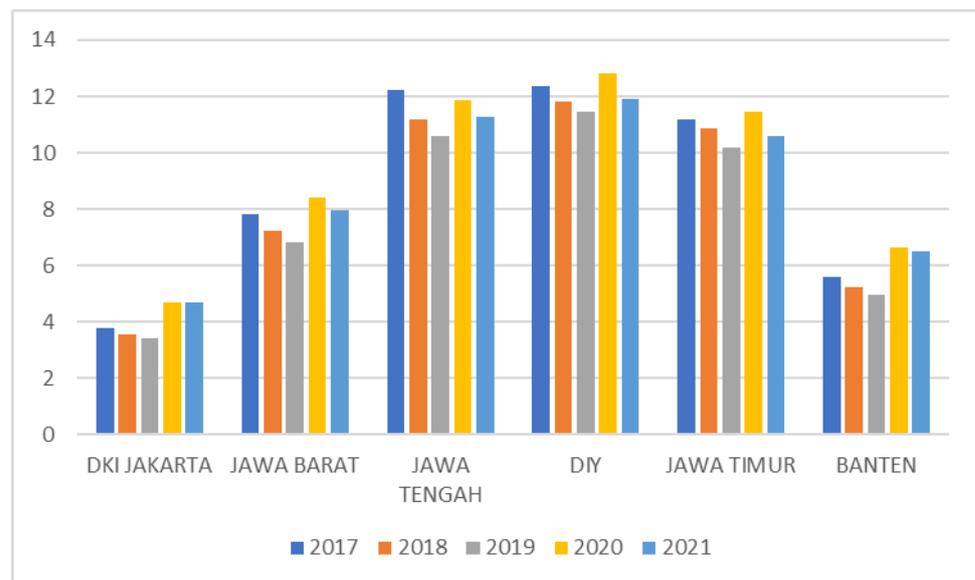
Sumber: BPS Indonesia, 2023 diolah

GAMBAR 1.4.

Grafik Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa Tahun 2017-2021
(Persen)

Dapat dilihat Gambar 1.4., IPM tertinggi pada tahun 2021 yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 81,11 persen, sedangkan IPM terendah berada di

provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 72,14 persen. Tinggi rendahnya IPM akan mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk. Dengan turunnya IPM, maka tingkat produktivitas penduduk juga akan turun, yang berdampak pada masyarakat yang berpendapatan rendah (Hartini, 2017).



Sumber: BPS Indonesia, 2023 diolah

GAMBAR 1.5.

Grafik Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2017-2021 (Persen)

Berdasar gambar diatas, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Pulau Jawa tertinggi berada di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 12,8 persen, tertinggi kedua yaitu Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,84 persen. Tingkat kemiskinan terendah berada di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 4,69 persen. Distribusi pendapatan yang tidak merata dan kemiskinan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika ketimpangan distribusi pendapatan tinggi, maka timbul kesan bahwa ada masyarakat di wilayah tersebut yang tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi saat ini. Artinya, hanya

segelintir orang saja yang bisa menikmati sepotong kue pertumbuhan ekonomi.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan sudah beberapa diteliti. Berdasarkan penelitian sebelumnya, setidaknya terdapat beberapa perbedaan pendapat. Penelitian Nasiruddin dan Arif (2023) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkapkan bahwa IPM, UMR, tingkat partisipasi Angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian Harahap (2022) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian Safitri *et al.*, (2021) di Indonesia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan, dan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian Farhan dan Sugiarto (2022) mengungkapkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan kemiskinan dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian Rosa dan Sovita (2016) memiliki hasil bahwa PDRB per kapita, populasi penduduk, dan TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2013-2021**”.

B. Batasan Masalah

Cakupan penelitian yang luas ini menuntut peneliti untuk mempersempit masalah agar pembahasan dapat terfokus pada isu-isu kunci yang digariskan dalam rumusan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat ketimpangan pendapatan yang digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan indeks Gini pada Pulau Jawa, meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.
2. Terdapat 4 variabel independent dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. PDRB dengan menggunakan jumlah Ribu Rupiah pada setiap tahunnya.
 - b. Tingkat pengangguran terbuka dengan menggunakan persentase kenaikan pengangguran setiap tahunnya.
 - c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

- d. Tingkat kemiskinan dengan menggunakan persentase penduduk miskin.
3. Penelitian ini menggunakan data periode 2013-2021 yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa?
4. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, informasi serta menambah ilmu pengetahuan mengenai ketimpangan pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan penelitian.